
**PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT DAN *INTERNAL CONTROL*
TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(Studi pada BUMN Terbuka di Indonesia)**

Gusnardi

FKIP – Pendidikan Ekonomi Universitas Riau
Jl. Binawidya KM. 12.5 Simpang Panam Pekanbaru – Riau 28293
e-mail: gusnardi1967@yahoo.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh peran komite audit dan *internal control terhadap pelaksanaan good corporate governance baik secara simultan maupun secara parsial pada BUMN Tbk. di Indonesia*. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sensus pada 13 BUMN Tbk. di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Responden penelitian ini adalah ketua komite audit, direktur/wadir keuangan, dan sekretaris perusahaan. Keabsahan dan keandalan hasil kuesioner diuji terlebih dahulu sebelum uji hipotesis dilakukan. Analisis data untuk pengujian hipotesis adalah dengan *path analysis*. *Penelitian ini menyimpulkan bahwa, peran komite audit dan internal control berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance, artinya perusahaan dengan komite audit dan internal control yang berperan dengan baik akan dapat meningkatkan pelaksanaan good corporate governance. Secara parsial dari kedua variabel independen, internal control mempunyai pengaruh terbesar terhadap pelaksanaan good corporate governance. Sedangkan peran komite audit pengaruhnya kecil terhadap pelaksanaan good corporate governance.*

Kata kunci: Komite audit, *internal control, good corporate governance*.

**THE INFLUENCE OF AUDIT COMMITTEE ROLE AND INTERNAL CONTROL
TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION
(Study on Go Public State Owned Companies in Indonesia)**

ABSTRACT. This research aims to study and analyse influence of the role of audit committee and internal control toward good corporate governance either in simultaneous and a partially at over the state-owned companies in Indonesia. This research was conducted by census methods over 13 public over the state-owned companies in Indonesia. The data used in this research were primary data collected by questioners. The research respondents were audit committee chairman, financial director, and corporate secretary. The validity and reliability of the data was tested before hypothesis testing. The data analysis for hypothesis testing was the path analysis. This research concludes that: the role of audit committee and internal control influential significantly toward good corporate governance over the state-owned companies, mean company with audit committee

Pengaruh Peran Komite Audit dan Internal Control Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Pada BUMN Terbuka Di Indonesia) (Gusnardi)

and internal of control is standing carefully will be able to increase execution of good corporate governance. Partially from both independent variables, internal of control has the biggest significant influence toward good corporate governance. While the influence of audit committee on good corporate governance is small.

Key words: Audit committee, internal control, good corporate governance.

PENDAHULUAN

Perhatian dunia usaha terhadap *good corporate governance (GCG) meningkat* sejak negara-negara di Asia dihantam krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 dan terbukanya skandal keuangan perusahaan raksasa dunia, termasuk Enron Corporation, Worldcom, dan Global Crossing. Krisis ini berdampak sangat luas terutama dalam merontokkan rezim-rezim politik yang berkuasa di Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Ketiga negara yang diawal tahun 1990-an dipandang sebagai "Macan Asia" harus mengakui bahwa pondasi ekonomi mereka rapuh, yang akhirnya berujung pada krisis keuangan, ekonomi, dan akhirnya merambat kepada krisis politik.

Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama terjadinya krisis ekonomi tersebut adalah karena lemahnya pelaksanaan GCG perusahaan-perusahaan termasuk BUMN dan BUMS di Indonesia. Untuk perusahaan yang dikelola pemerintah atau sebagian kepemilikannya dikuasai pemerintah (BUMN) bahkan sudah diatur supaya dalam pelaksanaan kegiatannya harus berpedoman kepada *corporate governance*.

Sehubungan dengan penerapan *good corporate governance pada BUMN, dari* hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan pada 16 BUMN selama bulan Oktober 2002 sampai Mei 2003, ternyata hanya enam perusahaan BUMN yang memiliki kinerja baik. Dari hasil audit BPKP tersebut dilaporkan bahwa komitmen BUMN untuk menerapkan *good corporate governance masih rendah. Indikator yang digunakan untuk* mengukur dan menilai pelaksanaan *good corporate governance pada BUMN* tersebut antara lain: komitmen menerapkan *good corporate governance, struktur* dan proses *good corporate governance pada pemegang saham, dewan komisaris,* direksi, dan berbagai organ pendukung lainnya. Dari hasil audit BPKP tersebut perusahaan yang menerapkan *good corporate governance secara "baik" ada 6* (enam) BUMN, dan "cukup" 10 (sepuluh) BUMN (Tabel 1).

Tabel 1. Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BUMN

No.	Nama BUMN	Penerapan GCG	No.	Nama BUMN	Penerapan GCG
1.	PT. BNI Tbk	86,16 (Baik)	9.	PT. Pelayaran Nas Ind	73,27 (Cukup)
2.	PT. Asuransi E I	79,62 (Baik)	10.	PT. Jasa Marga	72,32 (Cukup)
3.	PT. Pelindo	78,63 (Baik)	11.	PT. Adhi Karya	71,75 (Cukup)
4.	PT. Krakatau Stell	77,86 (Baik)	12.	PT. Kimia Farma Tbk	69,78 (Cukup)
5.	PT. PN VIII	77,83 (Baik)	13.	PT. Danareksa	69,52 (Cukup)
6.	PT. Surveyor Indo	76,54 (Baik)	14.	PT. Sarinah	68,03 (Cukup)
7.	PT. KAI	74,47 (Cukup)	15.	PT. Timah Tbk	67,76 (Cukup)
8.	PT. PLN	73,67 (Cukup)	16.	PT. Hotel Indo Natur	64,67 (Cukup)

Sumber : BPKP (2003)

Dari hasil audit BPKP terhadap penerapan GCG pada 16 BUMN tersebut dinyatakan, bahwa BUMN yang menerapkan GCG relatif baik adalah BUMN yang berstatus terbuka (Tbk), sedangkan BUMN lainnya dinilai belum menerapkan GCG dengan baik sesuai tuntutan yang diharapkan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* guna memperbaiki kinerja perusahaan, khususnya BUMN di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, tentang Penerapan Praktik *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 2 yang mewajibkan BUMN menerapkan *good corporate governance* secara konsisten.

Secara teoritis penerapan *good corporate governance* akan dapat memberikan beberapa keuntungan, di antaranya dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatnya nilai (kinerja) akan dapat mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh pengelola perusahaan dengan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan pribadi pengelola. Sebaliknya, jika pelaksanaan *good corporate governance* yang buruk akan menurunkan citra perusahaan, sehingga kepercayaan investor akan merosot.

Dengan diterapkannya *good corporate governance* pada BUMN akan memberikan beberapa manfaat pada BUMN tersebut, di antaranya (Tjager dkk, 2003): a) meningkatkan kepercayaan investor, akan mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid*; b) meningkatkan nilai perusahaan, sehingga BUMN dapat membantu penerimaan pemerintah melalui APBN; c) dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik; dan d) dapat meningkatkan kualitas pelayanan BUMN kepada *stakeholders*. BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, memiliki *value* bagi para pemegang saham dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Peran Komite Audit dan Internal Control Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Pada BUMN Terbuka Di Indonesia) (Gusnardi)

Landasan hukum pembentukan komite audit di BUMN adalah Keputusan Menteri Negara BUMN No.Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-103/M-PBUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002 juga mengatur dibentuknya komite audit di lingkungan BUMN. Kemudian diperkuat dengan Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance pada BUMN dalam pasal 14 (1)* menyatakan bahwa komisaris/dewan pengawas BUMN memiliki keharusan membentuk Komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris/dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Komite audit merupakan suatu organ terpenting yang disyaratkan dalam keputusan tersebut untuk mendukung implementasi *good corporate governance*. Komite audit dibentuk dalam rangka mengoptimalkan kinerja dewan komisaris, dengan pengawasan yang optimal dari dewan komisaris akan membantu korporasi mengelola perusahaan dengan efisien dan efektif sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Salah satu kasus yang masih hangat terkait dengan peran komite audit pada perusahaan BUMN adalah kasus audit laporan keuangan konsolidasi PT. Telkom Tbk. tahun 2002 yang tidak diakui oleh *Securities and Exchange Commission (SEC)*.

Selanjutnya kasus yang berkaitan dengan lemahnya *internal control* perusahaan adalah kasus yang menimpa salah satu BUMN Terbuka (Tbk), yaitu tentang laporan keuangan yang *overstated*, seperti diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terungkap kasus dugaan *mark-up laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk*, yaitu terjadinya pengelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk. tahun 2001 (senilai Rp 32,668 miliar, karena laporan keuangan yang seharusnya sebesar Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini menyeret sebuah KAP yang menjadi auditor PT. Kimia Farma Tbk. Dalam hal ini jelas terlihat lemahnya *internal control dan tidak berfungsinya komite audit* yang ada pada PT. Kimia Farma Tbk. tersebut. Kasus tersebut juga menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance; yaitu* pengungkapan yang akurat dan transparansi.

Internal control yang memadai harus dapat menyediakan: 1) Informasi yang dapat dipercaya; 2) Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan; 3) Pengamanan aset; 4) Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien; dan 5) Pencapaian tujuan yang ditetapkan. Tanggung jawab komite audit antara lain memastikan, bahwa *internal control dalam perusahaan tersebut* berjalan dengan baik. Tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan laporan keuangan maupun diskusi dengan manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal.

Dengan demikian jelas keberadaan komite audit dan *internal control sangat* penting dalam menciptakan *good corporate governance dan diharapkan akan bisa* diterima di masyarakat terutama bagi perusahaan-perusahaan yang *go public*.

Studi-studi yang dilakukan tentang komite audit di Indonesia masih jarang dilakukan, karena Bapepam dan BEJ sendiri baru mewajibkan para emiten untuk membentuk komite audit pada tahun 2000. Namun demikian, sudah cukup banyak studi ini dilakukan di negara-negara maju yang terlebih dahulu mewajibkan perusahaan-perusahaan yang *go public untuk membentuk komite audit, seperti* Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia.

Penelitian sebelumnya terhadap komite audit telah dipusatkan pada isu-isu yang berhubungan dengan formasi, komposisi, dan benefit dari komite audit. Seperti beberapa penelitian berikut ini telah membandingkan perbedaan karakteristik dari perusahaan yang memiliki komite audit dengan yang tidak memiliki komite audit (Pincus *et.al.*, 1989; dan Bradbury; 2004). Menggunakan *Agency Theory Framework*, Pincus *et.al.* (1989) dalam hipotesanya menyatakan, bahwa tuntutan untuk dimonitor oleh komite audit adalah fungsi dari *agency costs*. Mereka menemukan beberapa proksi bahwa *agency cost berhubungan erat* dengan pembentukan komite Audit.

Beberapa studi lainnya menguji hubungan keberadaan komite audit dan bermacam-macam proksi untuk kualitas laporan keuangan. DeFond and Jiambalvo (1994) dalam penelitiannya tentang *Debt Convenant Violation and Manipulation of Accruals*, menemukan bahwa *perusahaan-perusahaan yang overstating annual earnings selama beberapa periode pada perusahaan yang kurang menginginkan* adanya komite audit.

Halla (1999) dalam penelitiannya: *A View of Corporate Governance and Control In Finland*, menjelaskan bahwa *tanggung jawab komite audit adalah untuk* memberikan keyakinan bahwa pengendalian aset dan akuntansi telah diorganisir cukup memadai. Pembagian tanggung jawab sehubungan dengan *internal control* di antara semua anggota organisasi dari atas sampai bawah, yaitu komite audit memberikan pengarahan dan wawasan, pimpinan puncak menetapkan *internal control*, menetapkan etika dan iklim organisasi, senior manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih rinci dan personal lainnya bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya.

Selanjutnya Rindova (1999) yang dimuat dalam *Journal of Management Studies ; What Corporate Boards Have to do with Strategy: a Cognitive Perspective*, menyatakan bahwa *komite audit harus memainkan peranan penting* sebagai sistem pemantauan internal untuk memberikan keyakinan, bahwa tindakan-tindakan manajemen konsisten dengan kepentingan para pemegang saham. Dalam perkembangannya, komite audit bertugas mengawasi tanggung jawab manajemen dalam hal pelaporan keuangan. Peran tersebut mengalami perkembangan saat ini sehingga komite audit juga bertugas untuk mengawasi *internal control dan kegiatan auditor (DeZoort et.al, 2001)*.

Penelitian yang dilakukan Klein (2000) menemukan bahwa: 1) tidak terdapat hubungan yang sistematis antara komposisi Komite audit dan perjanjian dengan pemegang saham, 2) sesuai dengan asersi *Blue Ribbon Committee*, komposisi Komite audit merupakan salah satu unsur dalam mekanisme *corporate*

Pengaruh Peran Komite Audit dan Internal Control Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Pada BUMN Terbuka Di Indonesia) (Gusnardi)

governance, dan 3) ditemukan hubungan negatif antara independensi komite audit dan alternatif mekanisme corporate governance.

Penelitian lainnya oleh Agrawal & Knober (1996) menjelaskan, bahwa banyak alternatif yang dapat digunakan untuk pengendalian masalah agensi antara manajer dan pemegang saham dan telah menguji tujuh mekanisme pengendalian melalui pemegang saham dari dalam, dewan komisaris independen (komite audit), *debt financing dan aktivitas pengendalian perusahaan. Zaman (2001) menyatakan pula bahwa Komite audit akhirnya ikut bertanggung jawab terhadap internal control.*

Menurut Indra Safitri (Indonesia Market Links Network, 2 September 2002), seluruh keputusan yang dibuat oleh komisaris *independent tidak terpisahkan dari berjalannya mekanisme internal control di tubuh emiten termasuk adanya komite audit.* Penelitian yang dilakukan oleh Jayanthi Krishnan (2005) menyimpulkan, bahwa independensi dan pemahaman yang mendalam tentang laporan keuangan dari komite audit berhubungan erat dengan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah *internal control perusahaan.*

Tanggung jawab komite audit adalah memastikan, bahwa *internal control* dalam perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan laporan maupun diskusi dengan manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal. *Keterlibatan aktif komite audit dalam mengevaluasi pelaksanaan saran perbaikan internal control oleh manajemen akan dapat mendorong timbulnya lingkungan pengendalian yang baik, sehingga good corporate governance yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.*

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah komite audit dan *internal control berpengaruh terhadap pelaksanaan good corporate governance baik secara simultan maupun secara parsial pada BUMN Tbk. di Indonesia.*

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran komite audit dan *internal control* terhadap pelaksanaan *good corporate governance secara simultan maupun secara parsial pada BUMN Tbk. di Indonesia.*

Untuk mencapai tujuan tersebut, peran komite audit dan *internal control* terhadap pelaksanaan *good corporate governance diharapkan dapat berperan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang peran komite audit dan internal control dimaksud.*

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang berupaya menguji jawaban masalah yang bersifat sementara (hipotesis) berdasarkan teori tertentu. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey yaitu penelitian dengan menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan antar variabel pada populasi tersebut.*

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari fakta dan keterangan secara faktual yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada komite audit, *chief financial*, dan *corporate secretary* pada perusahaan BUMN Tbk. yang menjadi subjek penelitian.

Horizon waktu dari penelitian ini adalah *cross sectional* yaitu penelitian pada periode waktu tertentu yang dilakukan mulai Juni 2006 sampai dengan Pebruari 2007 yang dilakukan pada beberapa perusahaan sebagai subjek. Adapun unit analisis yang diteliti adalah BUMN Tbk. di Indonesia yang telah membentuk komite audit di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Data yang diperoleh dari para responden perlu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menghindari hal-hal yang bias dan meragukan keabsahan penelitian ini, maka diperlukan pengujian-pengujian terhadap alat ukur tersebut.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan *Software Lisrel 8.30*. Analisis jalur digunakan karena secara konseptual antar variabel independen memiliki hubungan dan dapat mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen baik langsung maupun tidak langsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

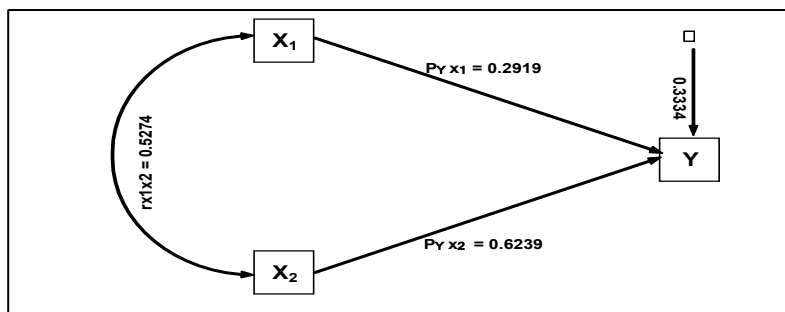
Setelah dilakukan analisis terhadap instrumen penelitian dan analisis penskalaan, data yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan menguji rumusan masalah berdasarkan struktur model antara variabel dalam penelitian.

Pengujian rumusan masalah dilakukan dengan menguji pengaruh peran komite audit dan *internal control* secara *simultan* maupun secara *parsial* terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

Pengaruh Peran Komite Audit dan *Internal Control* secara *Simultan* dan *Parsial* terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Setelah dianalisis, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur untuk menguji pengaruh peran komite audit (X_1) dan *internal control* (X_2) terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (Y).

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan program statistika SPSS 12.5 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Pengujian Variabel X_1 dan X_2 terhadap Variabel Y

Untuk menguji hipotesis penelitian ini perlu dihitung berapa nilai koefisien korelasi dan koefisien jalur antar variabel peran komite audit (X_1) dan *internal control* (X_2), secara parsial variabel independen tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (Y).

Dari hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien jalur dari variabel komite audit dan pengendalian internal terhadap *good corporate governance* masing-masing sebesar 0,2919 ($\rho_{YX_1} = 0,2919$) dan 0,6239 ($\rho_{YX_2} = 0,6239$).

Pengaruh peran komite audit dan *internal control* terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN Tbk. di Indonesia sebesar 66,66 %. Hasil tersebut berarti, bahwa pelaksanaan *good corporate governance* sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena kewajiban perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* terutama bagi BUMN-BUMN yang go public sudah merupakan keharusan, bahkan itu sudah merupakan kewajiban bagi BUMN tersebut dan sudah di atur dalam peraturan Bapepam LK dan Kep-Men. BUMN RI.

Salah satu BUMN Tbk. yaitu PT. Timah Tbk. telah melaksanakan komitmen kerja sama dengan BPKP dalam rangka memberdayakan *Good corporate governance* di lingkungan PT. Timah Tbk. Komitmen ini sesungguhnya mengandung makna, bahwa penerapan *good corporate governance* tidak timbul dari desakan formalitas/kewenangan belaka, namun lebih jauh daripada itu, yaitu timbul dari kesadaran yang mendalam bahwa implementasi *good corporate governance* sangat penting untuk kelangsungan usaha perusahaan yang akan meningkatkan reputasi PT. Timah Tbk. sebagai perusahaan yang terpercaya di pasar modal (*good corporate image*) dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk meningkatnya kinerja (*high performance*). (BPKP Online, 18 Juli 2007).

Dengan adanya kerja sama penerapan *good corporate governance* antara BPKP dengan BUMN Tbk., sesuai dengan visi BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah bertekad untuk ikut membantu terwujudnya *good governance* di sektor pemerintahan dan sektor korporat, pelayanan publik, serta penanggulangan KKN melalui strategi pengawasannya yang bersifat preventif, represif, dan edukatif, sehingga dapat mendorong terwujudnya *good corporate governance* yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk terwujudnya *good governance*.

Selanjutnya untuk menguji pengaruh komite audit dan *internal control* terhadap pelaksanaan *good corporate governance* terlebih dahulu dihitung koefisien jalur dari masing-masing variabel independen.

Pengaruh Peran Komite Audit dan *Internal Control* secara Simultan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Besarnya pengaruh peran Komite audit (X_1) dan *Internal Control* (X_2), secara simultan terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (Y) pada BUMN Tbk. di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh Komite Audit (X_1) dan *Internal Control* (X_2) terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Y)

No	Pengaruh	Besar Pengaruh
a.	Pengaruh langsung :	
	X_1 terhadap Y	38,92 %
	X_2 terhadap Y	9,61 %
	Total pengaruh langsung	48,53 %
b.	Pengaruh tidak langsung	
	Melalui X_1 dan X_2	18,13 %
c.	Total pengaruh X_1 dan X_2 , terhadap Y	66,66 %

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian.

Perhitungan pada Tabel 2 memperlihatkan, bahwa total pengaruh peran komite audit (X_1) dan *internal control* (X_2) terhadap pelaksanaan *good corporate governance* adalah sebesar 66,66 %. Besaran angka tersebut juga tercermin dalam nilai koefisien determinasi (R^2) sebagaimana tertera pada persamaan struktural. Artinya 66,66% baik buruknya pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN Tbk. di Indonesia disebabkan oleh peran komite audit dan *internal control*. Sementara 33,34% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar ketiga variabel tersebut.

Adanya pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap pelaksanaan *good corporate governance* menunjukkan bahwa peran komite audit secara simultan dengan *internal control* dapat mewujudkan terlaksananya *good corporate governance* pada BUMN Tbk. di Indonesia.

Angka epsilon sebesar 33,34% mengisyaratkan bahwa masih ada pengaruh faktor-faktor lain di luar faktor yang diteliti yaitu:

- Dewan komisaris. Dewan komisaris sangat berperan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*, dengan adanya pengaruh dewan komisaris diharapkan pelaksanaan *good corporate governance* dapat berjalan dengan baik (Dedi Supardi AS, 2005).
- Executive Directors*. (Neil, 2004:6) menyatakan bahwa dalam konteks *corporate governance*, ada tujuh pilar kunci. Ketiadaan salah satu pilar atau lebih, dapat menyebabkan gagalnya seluruh struktur tata kelola. Pilar-pilar tersebut antara lain : *Executive Directors, Non-executive Directors, Board Committees, Senior Management, Internal Auditing, External Auditing, dan Shareholders*.

Pengaruh Peran Komite Audit dan Internal Control Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Pada BUMN Terbuka Di Indonesia) (Gusnardi)

c. *External Auditors*. *External Auditors* membantu pelaksanaan tanggung jawab komite audit di bidang penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan dan *internal control*. Seperti yang telah dinyatakan Cangemi (2003) dan Nei (2004), bahwa " *effective corporate governance is a synergy between internal auditors, the board of directors, senior management, and external auditors*."

Secara parsial, *internal control* (X_2), memiliki pengaruh yang dominan terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (Y). Hal tersebut menunjukkan, bahwa *internal control* merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan untuk mencapai pelaksanaan *good corporate governance*.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa peran komite audit (X_1) dan *internal control* (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN Tbk. di Indonesia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat : Klein (2000) yang mengatakan, bahwa sesuai dengan asersi *Blue Ribbon Committee*, komposisi komite audit merupakan salah satu unsur dalam mekanisme *corporate governance*.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh KPMG (2004) yang mengatakan, bahwa komite audit berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya dalam mengawasi organisasi dengan mengandalkan audit internal sebagai sumber utama dalam membantu mereka untuk memastikan kualitas *corporate governance*. Dedi Supardi AS (2004) menyatakan, bahwa adanya hubungan antara dewan komisaris, formulasi strategi dan penerapan *internal control* ; adanya pengaruh peran dewan komisaris, formulasi strategi dan penerapan *internal control* terhadap *good corporate governance* dan kinerja bisnis, dan Krishnan (2005) menyatakan bahwa, independensi dan pemahaman yang mendalam tentang laporan keuangan dari komite audit berhubungan erat dengan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah *internal control* dalam perusahaan.

Pengaruh Komite Audit secara Parsial terhadap Good Corporate Governance

Besar pengaruh langsung peran komite audit (X_1) terhadap *good corporate governance* dan pengaruh tidak langsung melalui variabel *internal control* (X_2) dan audit internal (X_3) dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Besarnya Pengaruh Komite Audit (X_1) terhadap *Good Corporate Governance* (Y)

No	Pengaruh	Besar Pengaruh
a.	Pengaruh langsung X_1 terhadap Y	8,52%
b.	Pengaruh tidak langsung melalui X_2	9,61 %
c.	Total pengaruh X_1 terhadap Y	18,13%

Sumber : Data diolah dari hasil Penelitian.

Besarnya pengaruh langsung variabel peran komite audit (X_1) terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (Y) adalah 8,52% dan pengaruh tidak

langsung melalui variabel komite audit (X_1) terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (Y) adalah 9,61%. Jadi total pengaruh komite audit terhadap *good corporate governance* pada BUMN Tbk. di Indonesia adalah sebesar 18,13% dengan arah positif, artinya perusahaan dengan audit yang berperan dengan baik maka pelaksanaan *good corporate governance* dalam perusahaannya akan baik juga.

Dalam pengujian hipotesis ini diperoleh hasil, bahwa peran komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap pelaksanaan *good corporate governance*, namun pengaruhnya hanya sebesar 18,13%. Pengaruh peran komite audit terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dapat dilihat dari peran komite audit menurut F.A. Alijoyo (2003), dan tugas yang diemban komite audit menurut PWC (2003) di antaranya melakukan penilaian atas laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab komite audit ini sejalan dengan perannya dalam mendukung terlaksananya pelaksanaan *good corporate governance*. Sejalan dengan perannya sebagai pilar dalam pelaksanaan *good corporate governance*, juga sejalan dengan kerangka kerja *Code of Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (NCCG :2001)

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini terungkap, bahwa komite audit dalam BUMN Tbk. di Indonesia belum mempunyai peran yang maksimal dalam pelaksanaan *good corporate governance* (29,19%), komite audit yang dibentuk di BUMN Tbk. di Indonesia ternyata belum berjalan dengan semestinya sesuai perannya sebagai pilar pelaksanaan *good corporate governance*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil deskriptif jawaban responden dalam dimensi peran dan tanggung jawab komite audit terutama tentang perannya dalam melakukan pengawasan terhadap proses *good corporate governance* dan memastikan manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi terciptanya *good corporate governance* yang masing-masing sebesar 23,08% dan 38,46% memberikan skor 5, artinya bahwa peran dan tanggung jawab komite audit belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pengaruh *Internal Control* secara Parsial terhadap *Good Corporate Governance*

Besar pengaruh langsung *internal control* (X_2) terhadap *good corporate governance* dan pengaruh tidak langsung melalui variabel komite audit (X_1) dapat dilihat dalam Tabel 4. Besarnya pengaruh langsung variabel *internal control* (X_2) terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (Y) adalah 38,92% dan pengaruh tidak langsung melalui variabel komite audit (X_1) terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (Y) adalah 9,61%. Jadi total pengaruh *internal control* terhadap *good corporate governance* pada BUMN Tbk. di Indonesia adalah sebesar 48,53% dengan arah positif, artinya perusahaan dengan *internal control* yang lebih baik akan cenderung pelaksanaan *good corporate governance* akan lebih baik juga.

Pengaruh Peran Komite Audit dan Internal Control Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Pada BUMN Terbuka Di Indonesia) (Gusnardi)

Tabel 4. Besarnya Pengaruh *Internal Control* (X_2) terhadap *Good Corporate Governance* (Y)

No	Pengaruh	Besar Pengaruh
a.	Pengaruh langsung X_2 terhadap Y	38,92 %
b.	Pengaruh tidak langsung melalui X_1	9,61 %
c.	Total pengaruh X_1 terhadap Y	48,53 %

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa *internal control* memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Untuk memberikan penjelasan tentang *internal control* pada BUMN Tbk. di Indonesia, dapat dilihat dari analisis deskriptif jawaban responden terutama untuk lingkungan pengendalian tentang pengambilan keputusan perusahaan selalu mempertimbangkan nilai etika, menunjukkan bahwa 92,31% responden memberikan skor 5, artinya bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, pimpinan perusahaan selalu mempertimbangkan secermat mungkin. Kemudian dimensi monitoring, terutama dalam pembentukan fungsi audit internal dalam perusahaan, menunjukkan bahwa 92,31% responden memberikan skor 5, artinya bahwa perusahaan dalam melakukan *internal control* telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

Di antara variabel independen yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan *good corporate governance* adalah variabel *internal control*. Hal tersebut menunjukkan, bahwa BUMN Tbk. di Indonesia telah menerapkan *internal control* sesuai dengan yang diharapkan, terutama sebagai pilar *good corporate governance*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Rott (1998) menyatakan, bahwa *internal control* mempunyai hubungan yang erat dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan, bahwa dengan pelaksanaan *good corporate governance* sesuai dengan prinsip pelaksanaan *good corporate governance* yang merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat, sesuai dengan tujuan pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN dapat dicapai.

KESIMPULAN

Peran komite audit dan *internal control* berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*, artinya perusahaan dengan komite audit dan *internal control* yang berperan dengan baik akan dapat meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance*.

Secara parsial dari kedua variabel independen, *internal control* mempunyai pengaruh terbesar terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Sedangkan

komite audit pengaruhnya kecil terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Bila kedua variabel independen ini dapat bersinergi, maka pelaksanaan *good corporate governance* akan dapat tercapai. Dengan adanya sinergitas di antara komite audit dan penerapan *internal control*, pengaruhnya cukup besar terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Apabila ada di antara komite audit dan penerapan *internal control* tidak berperan dengan baik sesuai dengan piagam dan standar masing-masing, maka pelaksanaan *good corporate governance* tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan khususnya BUMN Tbk. Di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agrawal Anup & Knober Charles R., (1996). Firm performance and mechanism to control agency problem between managers and shareholders. *Journal of financial* and quantitative analysis. Vol. 34. No 3. September.pp.377-397.

Antonius Alijoyo,(2003). Keberadaan dan peran komite audit dalam rangka implementasi GCG. *Seminar nasional GCG-FKSPI BUMN/D Wilayah Jawa Timur 7* Mei 2003, Surabaya – Indonesia.

BPKP, (2003). Dasar-dasar corporate governance: Mengenalkan konsep good corporate governance bagi BUMN/D di Indonesia. Tim corporate governance BPKP.

BPK-RI, (2007). Standar pemeriksaan keuangan negara. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara No.01 Tahun 2007.

Dedi, Supardi, (2004). Pengaruh dewan komisaris, internal control, formulasi strategi dan corporate governance terhadap kinerja bisnis. Disertasi Pascasarjana Unpad. Belum dipublikasikan.

Bratbury, M.E., Mak, Y.T.and Tan, S.M., (2004). Board characteristics, audit committee characteristics and abnormal accruals. Working paper, Unitec New Zealand and National University of Singapore.

Cangemi P. and Tommie Singleton, (2003). Managing the audit function: a corporate audit department procedure guide. 3th Edition. John Wiley & Sons Inc.

Defond, M.L and Jiambalvo, J., 1994. Debt convenan violationt and manipulation of accruals. *Journal of accounting & economics* Vol. 17. pp 145-176.

Pengaruh Peran Komite Audit dan Internal Control Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Pada BUMN Terbuka Di Indonesia) (Gusnardi)

Dezort, FT, (1998). An analysis of experiance effects on audit committee members oversight judgments "Accounting organizations and society. Volume 2, Issue 1. January 1998. pp.1-21.

Hair, F.Joseph, Rolp E. Anderson., Ronald L. Tatham and William C.Blac, (2006). Multivariat data analysis. 9th Edition. Prentice Hall International. Inc.

Halla, Ilona P., (1999). A view of corporate governance and control in finland. Managerial auditing journal. 14/3. pp. 146-149.

I Nyoman Tjager, F. Antonius Alijoyo, Humphrey R. Djemat, & Bambang Soembodo, (2003). Corporate governance, tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia. PT. Prenhallindo. Jakarta.

Indra Safitri, (2002). Indonesia market links network, (2 September 2002). Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No Kep-339/BEJ/07-2001 tahun (2001): tentang Kewajiban Memiliki Komite Audit.

Keputusan Menteri BUMN, (2002). Penerapan praktik *good corporate governance* pada badan usaha milik negara. KEP No. 117/M/MBU/2002. tanggal 1 Agustus 2002.

_____, (2002). Pembentukan komite audit pada badan usaha milik negara. KEP No. 103/M/MBU/2002. tanggal 1 Agustus 2002.

Klein, (2000), Causes and consequences of variation in audit committee composition. Working paper April, 2000, Social science research network.

KPMG, (2004). *Fraud survey report 2004*. www.kpmg.com.

Krishnan, Jayanthi, (2005). Audit committee quality and internal control: And empirical analysis. The accounting review. Vol. 80, No.2. pp 649-675.

Menteri P-BUMN, (1999). Pembentukan komite audit badan usaha milik negara. SK.KEP No. 133/M/MBU/1999. tanggal 8 Maret 1999.

Moermahadi Soerja Djanegara, (2005). Pengaruh pelaksanaan pengendalian intern, peran komite audit, faktor internal organisasi terhadap good corporate governance dan kinerja perusahaan. *Disertasi. PPs Unpad. Belum dipublikasikan*.

NCGG., (2001). Pedoman good corporate governance. Komite nasional kebijakan corporate governance. Jakarta.

Pricewaterhouse Coopers, (2003). Audit committes: Good practice for meeting market expectations. 1th Edition. PWC.

Rindova V.P., (1999), What corporate boards have to do with strategy: A cognitive perspective. Journal of management studies. 36(7). 953-957 dalam Lukviarman.

Niki. 2001 Key characteristics of corporation governance: The case of Indonesia. Graduate school of business. Curtin University of Tehcnology, Perth. Western Asustralia.

Rott, S.J., (1998). Beyond COSO; Internal control to enhance corporate governance, John Wiley & Sons, New York.

Sekaran, Uma, (2003). Research method for business : A skill building approach. 4th Edition. New York. John Wiley & Sons Inc.

Zaman, Mahbub, (2001). Trunbull-generating undue expectations of the corporate governance role of audit committee. Managerial auditing journal. Vol.16 no.1, pp 5-9.